**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT OLEH BUMKAM JAMBAI JAYA MELALUI
USAHA EKONOMI DESA DAN SIMPAN PINJAM (UED-SP) DENGAN MASYARAKAT
DI DESA JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK**

Oleh: Malahayati Tarigan

Pembimbing 1: Dr. Hayatul Ismi, SH.,MH.

Pembimbing 2: Setia Putra, SH.,MH

Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri No.42

Ilmu Hukum, Universitas Riau

Email: Malahayati.Tarigan0841@student.unri.ac.id

ABSTRACT

Village Economics and Savings and Loans Business (UED-SP) is an institution engaged in savings and loans and belongs to the village/Ward community which is managed and managed by the village/ward community. UED-SP was formed through village/ward deliberation and determined by village/Ward decisions. In fact, the purpose of the establishment of UED-SP was to increase the entrepreneurial creativity of village/ward community members. who have low income in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 6 of 1998 concerning Savings and Loan Village Economic Enterprises.

This study aims to find out how the implementation of credit agreements in Village-Owned Enterprises (BUMKam) through Jambai Jaya UED-SP in Jambai Makmur Village, Kandis District, Siak Regency, as well as the factors causing bad loans and how to resolve them. default in the event of bad credit. This research is included in the type of empirical or sociological legal research. Empirical or sociological legal research as research that wants to see the correlation between law and society itself, so as to reveal the effectiveness of law enforcement in society.

From the results of the research, the credit granting procedure applied by BUMKam Jambai Jaya through the Jambai Jaya UED-SP has been carried out properly as it should in the existing procedures for granting credit to its customers. This has been regulated and carried out by UED-SP Jambai Jaya which is contained in the implementation instructions and also in the Articles of Association and Bylaws (AD/ART) which have been set by the program that oversees UED-SP Jambai Jaya under the auspices of the Community Empowerment Service and Village of Siak Regency Empowerment Section. In this credit activity, UED-SP Jambai Jaya should further improve the performance of managers in providing loans to further minimize the occurrence of bad loans and increase socialization to the public so that people know the purpose and function of UED-SP Jambai Jaya and provide guidance and direction to beneficiaries to utilize funds loans properly and correctly in order to achieve the goals of UED-SP Jambai Jaya itself, which is to empower the lower middle class community in business development. To achieve good credit, the manager of UED-SP Jambai Jaya should actually carry out the procedures for granting credit as the procedures that already exist in various theories. And not giving much leeway to beneficiaries who experience bad credit so that the objectives of this Village Empowerment Program can run well.

Keywords: Agreement – Village Economic Business and Savings and Loan – Bad Credit.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan. Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan desa/kelurahan, Sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, tentunya program ini diharapkan mampu menambah penghasilan masyarakat melalui pinjaman modal usaha yang diberikan. Bahkan tujuan dibentuknya Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) salah satunya adalah meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.¹

Secara nasional dasar hukum dibentuknya Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan dan Pinjam (UED-SP). Pasal 1 huruf d Permendagri Nomor 6 Tahun 1998 mendefinisikan Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP), yaitu “Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan”.²

Menurut Rochmat Soemitro diperlukan pembangunan ekonomi yang diajukan guna mencapai masyarakat adil dan makmur, serta material dan spritual yang merata untuk mencapai suatu masyarakat yang bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan dan bebas dari penjajahan. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan dibidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Program Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan melalui Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program yang sejalan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah, dengan sasaran utamanya adalah masyarakat miskin/hampir miskin. Program pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) ini dimaksud untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh masyarakat desa sebagai pintu masuk bagi kelompok masyarakat di pedesaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang selama ini telah menjadi sasaran para rentenir.⁴

Kegiatan Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) berkonsentrasi pada pemberian dana usaha pada masyarakat yang membuntuhkan modal untuk menjalankan usahanya, kegiatan Usaha Ekonomi dan Desa Simpan Pinjam (UED-SP) diatur dalam pasal 5 Permendagri Nomor 6 Tahun 1998 :

- a) “Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/kelurahan yang dinilai produktif”
- b) “Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/ kelurahan sebagai anggota Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP)”
- c) “Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) dalam kaitan kegiatan usahanya”
- d) “Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam”

Dalam pelaksanaannya, antara Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) dengan masyarakat pemanfaat dana sudah jelas disebutkan bahwa pihak pemanfaat (debitur) akan membayar angsuran setiap bulan kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur). Namun pada kenyataannya seperti halnya pada semua bidang usaha selalu ada tantangan dan resiko dalam pemberian kredit atau pinjaman tersebut tantangan dan resikonya adalah tidak semua pinjaman berjalan lancar sebagaimana mestinya tanpa adanya tunggakan kewajiban. Tunggakan kewajiban yang

¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.

² Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

³ Rochmat Soemitro, *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Refika Ofset, Bandung, 1991, hlm. 178.

⁴ Budi Hartono, *Perlindungan Debitur KPM & KPR Menghadapi Penagihan Utang dan Lelang Jaminan oleh Kreditur*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

diartikan bahwa ada sebagian pinjaman yang telah diberikan kepada debitur atau pemanfaat mengalami kemacetan pembayaran.⁵

Penyebab kredit macet ini umumnya disebabkan oleh faktor debitur seperti sikap kooperatifnya yang berkurang, tidak adanya itikad baik dari debitur, maupun adanya kerugian usaha debitur yang menyebabkan ia tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, juga dapat disebabkan oleh ketidaksengajaan karena debitur mengalami suatu musibah sehingga kewajibannya tidak mampu untuk dipenuhi.⁶ Kebanyakan awal mula terjadi kemacetan pembayaran disebabkan karena ekonomi nasabah BUMKam Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) yang tidak stabil atau ekonomi yang pasang surut.⁷

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik membahas tentang pelaksanaan kegiatan usaha pada Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Jambai Makmur dalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini, dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh BUMKam Jambai Jaya Melalui Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Dengan Masyarakat Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit oleh BUMKam Jambai Jaya melalui Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) dengan Masyarakat di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pinjaman dana Oleh BUMKam Jambai Jaya Melalui Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit oleh Usaha Ekonomi Desa dan

Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dengan Masyarakat di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis.

- b. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan, sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perjanjian

Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.⁸

Menurut Zaeni Asyhadie Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.⁹

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰ Tidak jauh beda dengan Subekti, Herlien Budiono menyampaikan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan demikian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.¹¹

2. Konsep Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan definisi litigasi tidak diatur

⁵ Budi Hartono, *Perlindungan Debitur KPM & KPR Menghadapi Penagihan Utang dan Lelang Jaminan oleh Kreditur*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 1.

⁶ Ngurah Pradita Putra. *“Penyelesaian Kasus Tentang Kredit Macet Pada PT. BPR Lestari.”* Kertha Semaya: Journal Hukum 2, no.4, (2018), hlm. 4.

⁷ Wawancara dengan *Bapak Hasbullah, S.E.*, Tenaga Ahli Kredit Mikro Badan Usaha Milik Kampung Kabupaten Siak, Hari Senin, 13 September 2021, Bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIII, Jakarta: Intermasa, 1991, hlm. 1.

⁹ Retna Gumanti, *“Syarat sahnya perjanjian (di tinjau dari KUHPerdato)”*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.05 No. 1 Tahun 2012.

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 2010, hlm. 1.

¹¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

secara eksplisit didalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.¹²

Negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri, selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung, sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi, sedangkan arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta dengan arbitrase sebagai hakim swasta yang memutuskan untuk kedua belah pihak yang bersengketa.¹³

3. Teori Itikad Baik

Itikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide* yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.¹⁴

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

¹² Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹³ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 86.

¹⁴ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawati. 2006. *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR. Hlm. 167.

¹⁵ Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*, Mandar Maju. Bandung, 2012. hlm. 94.

1. Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa atau kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa atau kelurahan setempat.¹⁶
2. BUMKam adalah adalah suatu lembaga/badan perekonomian Kampung yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Kampung, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan.¹⁷
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸
4. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁹
5. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁰
6. Wanprestasi adalah Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan mengenai

¹⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

¹⁷ Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang BUMKam.

¹⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²¹ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pelaksanaan perjanjian kredit oleh Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) jambai jaya dengan masyarakat di desa jambai makmur kecamatan kandis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Desa Jambai Makmur yaitu Kantor Kepala Desa Jambai Makmur dan Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan Masyarakat. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kredit oleh Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dengan masyarakat di desa jambai makmur kecamatan kandis.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Direktur Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya di Desa Jambai Makmur, dan Masyarakat sebagai Pemanfaat dana.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²²

NO	Kriteria Responden	Populasi	Sampel	Prese ntase
1.	Direktur Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya	1	1	100%
2.	Pemanfaat yang Menunggak	50	3	6%
	Jumlah	51	4	-

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Direktur Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya di Desa Jambai Makmur dan Masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan

pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.²³ Sumber data tersebut antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Baik itu peraturan Perundang-undangan, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang BUMKam;
5. Peraturan Bupati Siak Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daya Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Kampung;

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
 - b. Kajian Kepustakaan
- ## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1) Pengertian Perjanjian Kredit

Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau *credo* atau *credutum* yang berarti saya percaya. Seseorang

²² *Ibid.* hlm. 91.

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta: 2014, hlm. 74.

yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.²⁴ Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.²⁵

2) Unsur-unsur Perjanjian Kredit

1. Kepercayaan adalah suatu kepercayaan dan keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang.
2. Suatu Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah dicapai.
4. Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.
5. Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga, biaya provisi dan komisi serta administrasi kredit ini merupakan

keuntungan utama bank.

3) Jenis-Jenis Kredit

1. Dilihat dari segi Kegunaannya
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK)
 - b. Kredit investasi
 - c. Kredit Konsumsi
2. Kredit Dilihat Dari Sudut Jangka Waktunya.
 - a. Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan)
 - b. Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan)
 - c. Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan)
3. Kredit dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan
 - b. Kredit tanpa jaminan
4. Kredit dari segi sektor usaha
 - a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 - b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan dalam jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam, dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
 - c. Kredit industri, yaitu untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah maupun besar.
 - d. Kredit pertambangan, yaitu kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
5. Kredit pendidikan, merupakan jenis kredit yang diberikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
6. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8. Dan sektor-sektor lainnya

B. Tinjauan Umum Tentang BUMKam

1) Pengertian BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung)

Badan Usaha Milik Kampung sama dengan Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak

²⁴ Yohanes Benny Apriyanto, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi*, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Hlm. 6.

²⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

No 18 Tahun 2007 bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Dasar Hukum BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung)

Dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kabupaten Siak antara lain:²⁶

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan payung hukum atas BUMKam.
3. Permendagri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam.
4. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 tentang Perubahan nama Desa menjadi Kampung.
7. Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung.

3) Tujuan BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung)

Tujuan dari Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah:²⁷

1. Meningkatkan perekonomian Kampung.
2. Mengoptimalkan aset Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung.

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat kampung dan Pendapatan Asli Kampung.

4) Jenis BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung)

Jenis usaha Badan Usaha Milik Kampung dapat berupa:

1. Jasa pelayanan perindustrian dan perdagangan
2. Pertanian
3. Pekerjaan Umum
4. Kehutanan
5. Perkebunan
6. Jasa Keuangan
7. Peternakan
8. Perikanan
9. Pertambangan dan Energi
10. Serta usaha-usaha lain yang

5) Asas-Asas BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung)

Asas-Asas BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) adalah:²⁸

1. Transparansi.
Seluruh operasional kegiatan BUM Kampung harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*accountable*).
2. Partisipasi.
Pengertian partisipasi adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan BUM Kampung mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.
3. Desentralisasi.
Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.
4. Akuntabilitas.
Bahwa setiap transaksi keuangan maupun administrasi dapat dilakukan tertib dan

²⁶ Undang-undang No. 11 tahun 2016 Tentang Buku Petunjuk Teknis BUMKam Kabupaten Siak.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*

mencatat semua kejadian tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP).

1) Pengertian Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP)

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP), Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan setempat.²⁹

2) Tujuan dan Kegiatan Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP)

Tujuan dibentuknya Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) adalah untuk:

- Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
- Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
- Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Dan adapun kegiatan Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) meliputi:

- Memberikan Pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/Kelurahan yang dinilai produktif.
- Menerima Pinjaman uang dari

masyarakat Desa/Kelurahan sebagai anggota Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP).

- Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) dalam kaitan kegiatan usahanya.
- Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

3) Produk Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP)

- Simpanan
- Kredit atau Pinjaman Kredit

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Jambi Makmur

1. Sejarah Pembentukan Desa Jambi Makmur³⁰

Desa Jambi Makmur merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Belutu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Sri Gemilang di Kecamatan Koto Gasib, Desa Bekalar, Jambi Makmur, Sungai Gondang, Pencing Bekulo di Kecamatan Kandis, Desa Sabak Permai, Selat Guntung dan Bandar Pedada di Kecamatan Sabak Auh, Desa Kayu Arang dan Rawa Mekar Jaya di Kecamatan Sungai Apit.

2. Keadaan Geografis Desa Jambi Makmur.³¹

Desa Jambi Makmur adalah bagian dari Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan luas wilayah sekitar 12.729,00 Ha. Sebagian besar Lahan di Desa Jambi Makmur merupakan Tanah perkebunan yang luasnya 11.829,00 Ha dan kebanyakan merupakan Kebun Sawit.

Secara administratif batas-batas wilayah Desa Jambi Makmur adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa/ Kel. Pinngir Kec. Pinggir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa/Kel. Bekalar Kec. Kandis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa/Kel. Kandis Kec. Kandis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa/Kel. Pencing Bekulo Kec. Kandis.

3. Iklim Desa Jambi Makmur³²

Iklim di Desa Jambi Makmur pada umumnya beriklim tropis dan suhu udara maksimum berkisar antara 30° C mempunyai

²⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

³⁰ Data Olahan Desa Jambi Makmur Tahun 2021.

³¹ Data Olahan Desa Jambi Makmur Tahun 2021.

³² Data Olahan Desa Jambi Makmur Tahun 2021.

cuaca kemarau atau musim panas dan cuaca penghujan atau musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap kegiatan atau aktifitas yang ada di Desa Jambai Makmur, baik perkebunan, atau pada pola pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

4. **Visi Dan Misi Desa Jambai Makmur**³³

Visi dan Misi Kantor Desa Jambai Makmur, Visi “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berintegritas dan mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan *Clean Government And Good Governanc*” Misi “Untuk Mewujudkan Agar ada kesesuaian dengan visi yang telah ditentukan. Maka diperlukan misi yang mendukung, agar menjadi lebih Optimal.” Pemerintah Desa Jambai Makmur telah menetapkan Misi Sebagai Berikut:

- 1) Meningkatkan Iman dan Taqwa serta SDM Kampung Jambai Makmur.
- 2) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan dan Perizinan.
- 3) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pemerintah Kampung Jambai Makmur.

Mewujudkan SDM Aparatur yang Profesional.

5. **Pemerintahan Desa Jambai Makmur**³⁴

Secara administratif Desa Jambai Makmur terdiri dari 6 RW dan 23 RT. Desa Jambai Makmur berstatus sebagai Desa perdesaan yang masih sebagai Desa berkembang. Sebagian besar Desa Jambai Makmur merupakan Desa Perkebunan dan merupakan Desa di daratan.

6. **Masyarakat Desa Jambai Makmur**³⁵

- a. Pendidikan
Dalam meningkatkan kualitas SDM, Dari tingkat kelulusan pendidikan masyarakat Desa Jambai Makmur rata-rata tamatan TK Sampai Perguruan Tinggi Total sebanyak 15.756 jiwa
- b. Mata Pencaharian
Sebagian Besar Masyarakat Desa Jambai Makmur berprofesi sebagai petani perkebunan ladang, berjumlah sekitar 561 jiwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 18 jiwa, TNI 3 jiwa, Guru 11 Jiwa, Karyawan Perusahaan 373 jiwa ada juga beberapa masyarakat Desa Jambai Makmur yang berprofesi sebagai

peternak, Satpam, Buruh Harian Lepas dan lain sebagainya.

- c. Agama
Penduduk di Desa Jambai Makmur terdiri dari beberapa kelompok keagamaan diantaranya Islam sebanyak 2833 Jiwa Kristen sebanyak 332 Jiwa dan Hindu Sebanyak 142 Jiwa. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Jambai Makmur.
- d. Suku Budaya
Mayoritas masyarakat Desa Jambai Makmur bersuku Jawa. Dari data masyarakat Desa Jambai Makmur 2267 jiwa bersuku Jawa, 15 jiwa bersuku Melayu, 327 jiwa bersuku Batak, 142 bersuku Bali dan lainnya.

B. Gambaran Umum Tentang Badan Usaha Milik Kampung Jambai Jaya

1. **Latar Belakang**³⁶

BUMKam merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga kampung melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMKam juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli kampung (PAK) yang memungkinkan kampung mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, maka kampung Jambai Makmur pada tanggal 29 Oktober 2015 mendirikan Badan Usaha Milik Kampung atau yang sering disebut BUMKam dan diberi nama Jambai Jaya dengan didirikannya BUMKam Jambi Jaya tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset kampung untuk membangun kesejahteraan warga kampung Jambai Makmur, karena bukan lagi program ‘Topdown’ atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan kampung yang digerakkan oleh kekuatan warga.

2. **Visi dan Misi**³⁷

Visi dari pendirian BUMKam Jambi Jaya yaitu “Mewujudkan Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera.” Misi BUMKam Jambai Jaya

³³ Data Olahan Desa Jambai Makmur Tahun 2021.

³⁴ Data Olahan Desa Jambai Makmur Tahun 2021.

³⁵ Data Olahan Desa Jambai Makmur Tahun 2021.

³⁶ Data Olahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2021.

³⁷Data Olahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2021.

mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perekonomian kampung.
- b. Memanfaatkan aset kampung untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi kampung
- d. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

3. Dasar Hukum

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, BUMKam Jambai Jaya berpedoman pada :

- a. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 tentang BUMDes;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP).
- c. UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (LKM)
- d. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 87 Dan 88 tentang desa;
- e. PP No. 43 Tahun 2014 Dan PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU desa, khususnya BAB VIII tentang BUMDes Pasal 132 terkait dengan pendirian BUMDes;
- f. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMdes;
- g. Peraturan desa kampung Jambai Makmur Nomor 5 Tahun 2015 tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jambi Jaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh BUMKam Jambai Jaya melalui Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) dengan Masyarakat Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

1. Proses Pemberian Kredit di Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya prosedur pemberian kredit yang mereka lakukan adalah sebagai

berikut:³⁸

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal, proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang :

a. Riwayat hidup calon pemanfaat (debitur)

Yang berisikan jenis bidang usahanya, latar belakang pendidikannya, perkembangan usahanya, serta bagaimana pemasaran usahanya.

b. Tujuan pengambilan kredit

Dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kreditnya, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian yang juga mendapatkan perhatian khusus adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

c. Besarnya kredit yang diminta dan jangka waktu pengembalian.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya adalah perlu dijelaskan secara rinci cara-cara pemanfaat dalam mengembalikan kreditnya apakah dengan hasil penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu atau sebagainya. Biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu. Apabila jaminan berupa tanah maka jaminannya sertifikat tanah, apabila jaminan berupa kendaraan bermotor maka jaminannya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

2. Pemeriksaan bahan/berkas pinjaman.

Setelah pengajuan proposal dan berkas-berkas, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Dalam tahap pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Verifikasi Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya, Tim

³⁸ Wawancara dengan *Bapak Jaka Mulya*, Direktur BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 8 November 2021, Jam 16.00 WIB di Rumah Bapak Jaka Mulya.

Verifikasi Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya disini melakukan seleksi atas proposal calon pemanfaat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak Tim Verifikasi Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya belum lengkap atau belum cukup maka calon pemanfaat diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu calon pemanfaat tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara Pertama

Dalam tahap ini Pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya melakukan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya inginkan. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pemanfaat yang sebenarnya.

4. Penetapan Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, dalam hal ini dilakukan oleh pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).

5. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).

6. Penyaluran/Penarikan Dana Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemanfaat yang akan membutuhkan pinjaman atau kredit dari Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya agar dapat dilakukan penilaian terhadap pemanfaat.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi antara BUMKam Jambai Jaya Melalui Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dengan Nasabah di Desa Jambai Makmur.

Pada pelaksanaan pemberian kredit di Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya juga terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya kredit macet yang mana faktor-faktor tersebut timbul dari pihak debitur yakni pemanfaat dari Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya, adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Pendapatan yang tidak menentu dikarena semakin hari pendapatan dari debitur yang tidak menentu bahkan semakin hari menurunnya daya beli masyarakat akibat *pandemic covid-19* yang kemudian berdampak langsung pada pendapatan yang diperoleh dari usaha debitur terlebih kebutuhan hidup yang terus meningkat yang mengakibatkan debitur mengalami kredit macet.³⁹

2) Dana kredit digunakan untuk keperluan lain yang dimana kredit yang tujuan awalnya diberikan sebagai modal untuk meningkatkan usaha debitur namun dikarenakan adanya keperluan mendesak yang kemudian dana kredit tersebut digunakan untuk keperluan lain seperti untuk membayar keperluan pengobatan anak yang baru saja kecelakaan, membayar hutang, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.⁴⁰

3) Gagal panen pada lahan pertanian dari debitur juga salah satu penyebab kredit macet, gagal panen sendiri biasanya disebabkan oleh serangan hama, perubahan iklim dan kelangkaan pupuk, di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis sendiri pada masa *pandemi covid-19* pupuk cukup susah didapatkan dan seperti yang sudah kita ketahui pupuk sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, hal tersebut mengakibatkan pendapatan debitur menjadi berkurang sehingga debitur mengalami kredit macet dikarenakan pendapatan debitur yang berprofesi sebagai petani terutama petani Kelapa Sawit yang

³⁹ Wawancara dengan *Bapak Ngadirin*, Pemanfaat BUMKam Jambai Jaya, Hari Sabtu 13 November 2021, Jam 16.00 WIB Bertempat di Rumah Bapak Ngadirin.

⁴⁰ Wawancara dengan *Bapak Mesno*, Pemanfaat BUMKam Jambai Jaya, Sabtu 13 November 2021, Jam 17.00 WIB Bertempat di Rumah Bapak Mesno.

banyak terdapat di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis datang dari hasil pertanian yang dikelola oleh debitur.⁴¹

4) Itikad tidak baik dari debitur yaitu pihak debitur yang tidak memiliki itikad baik dengan sengaja tidak membayar atau tidak mempunyai niat untuk membayar kembali angsuran kredit sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak didalam surat perjanjian sehingga terjadinya wanprestasi atau kredit macet dalam perjanjian kredit tersebut seperti dalam hal penagihan angsuran pembayaran pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya sudah datang kerumah pemanfaat dengan niat menanyakan pembayaran kredit tetapi ada beberapa pemanfaat yang marah-marah kepada pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya.⁴²

Dalam proses penagihan yang dilakukan oleh Pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya Desa Jambai Makmur berbeda dengan Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) atau Usaha Ekonomi Kampung dan Simpan Pinjam (UEK-SP) lainnya di Kecamatan Kandis, dalam sistem penagihan yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya langsung melakukan ke Rumah-Rumah Pemanfaat yang meminjam dengan cara kekeluargaan tanpa adanya paksaan untuk segera mengembalikan dananya. Sedangkan Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) atau Usaha Ekonomi Kampung dan Simpan Pinjam (UEK-SP) lainnya di Kecamatan Kandis si pemanfaatnya yang langsung datang ke kantor untuk membayar.⁴³

B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pinjaman dana Oleh BUMKam Jambai Jaya Melalui Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam

(UED-SP) Jambai Jaya dengan Masyarakat Pemanfaat Dana di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis.

1. Proses Penyelesaian Wanprestasi.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Jambai Jaya peneliti menemukan ada dua bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuat antara pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya selaku kreditur dan pemanfaat selaku debitur, bentuk wanprestasi yang dilakukan pertama pihak debitur tidak memenuhi persatasinya sama sekali dalam hal ini tidak adanya itikad baik dari pihak debitur yang dimana pihak debitur dengan sengaja tidak memenuhi prestasinya sama sekali dengan tidak mengangsur setoran kredit pada tanggal yang telah ditetapkan pada surat perjanjian yang telah dibuat dan telah disepakati kedua belah pihak. Bentuk wanprestasi yang kedua yaitu debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, dalam hal ini pihak debitur tetap memenuhi prestasinya namun dalam mengangsur pinjaman kreditnya telah melewati waktu yang telah disepakati didalam surat perjanjian.⁴⁴

Dalam hal penyelesaian wanprestasi dalam kredit macet yang dilakukan oleh debitur, hal pertama kali yang dilakukan yaitu Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya selaku kreditur terlebih dahulu memberikan somasi dalam bentuk surat peringatan sebanyak 3 kali kepada debitur, hal ini untuk memerintahkan atau memberitahukan bahwa debitur harus segera memenuhi prestasinya dengan mengangsur kredit setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan pada surat perjanjian yang telah disepakati.⁴⁵

Salah satu penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi adalah mediasi. Mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu

⁴¹ Wawancara dengan *Ibu Nurhayati*, Pemanfaat BUMKam Jambai Jaya, Hari Minggu 14 November 2021, Jam 10.00 WIB Bertempat di Rumah Ibu Nurhayati.

⁴² Wawancara dengan *Bapak Jaka Mulya*, Direktur BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 8 November 2021, Jam 16.00 WIB Bertempat di Rumah Bapak Jaka Mulya.

⁴³ Wawancara dengan *Bapak Jaka Mulya*, Direktur BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 8 November 2021, Jam 16.00 WIB Bertempat di Rumah Bapak Jaka Mulya.

⁴⁴ Wawancara dengan *Bapak Jaka Mulya*, Direktur BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 8 November 2021, Jam 16.00 WIB Bertempat di Rumah Bapak Jaka Mulya.

⁴⁵ Wawancara dengan *Bapak Jaka Mulya*, Direktur BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 8 November 2021, Jam 16.00 WIB Bertempat di Rumah Bapak Jaka Mulya.

persengketaan.⁴⁶

Asumsinya bahwasannya pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang di persengketakan.⁴⁷

jumlah angsuran bulanan dan memperpanjang masa angsurannya.⁴⁸ Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya sendiri dalam penyelesaian wanprestasi sejauh ini belum ada yang sampai ke tahap pengadilan, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya sendiri yaitu dengan cara musyawarah, yang dimana dalam melakukan musyawarah pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya mendatangi kediaman dari pihak debitur didampingi dengan ketua RT/RW setempat, tujuan dari musyawarah yang dilakukan antara pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dan pemanfaat ini yaitu untuk mengetahui penyebab atau kesulitan apa yang dialami oleh debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya dan dapat ditemukan solusi agar pihak debitur dapat mengangsur pinjaman kreditnya, setelah melakukan musyawarah antara pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dan pihak debitur melakukan Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*) terhadap jadwal atau jangka waktu pembayaran utang maupun perubahan besaran angsuran.⁴⁹

⁴⁶ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, 2013, hlm. 220.

⁴⁷ Dasrol dan Hengki Firmada, *Hukum Perbankan Cetakan I*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 124.

⁴⁸ Wawancara dengan *Bapak Jaka Mulya*, Direktur BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 8 November 2021, Jam 16.00 WIB Bertempat di Rumah Bapak Jaka Mulya.

⁴⁹ Wawancara dengan *Bapak Jaka Mulya*, Direktur BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 8 November 2021, Jam 16.00 WIB Bertempat di Rumah Bapak Jaka Mulya.

Penyelesaian kasus yang terjadi antara pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dengan salah satu pemanfaat yaitu Bapak Mesno dimana Pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya mengambil kebijakan yang pertama mengingatkan kepada Bapak Mesno untuk membayar angsuran pinjamannya, tetapi akibat pandemi Bapak Mesno belum mampu untuk membayarkan angsuran pinjamannya, sehingga menyebabkan kredit macet, dalam menyikapi hal tersebut pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) memberikan waktu kepada Bapak mesno dan menahan surat tanahnya sampai bapak Mesno melunasi pinjamannya, kebanyakan kasus yang sudah terjadi tidak sampai ke pengadilan di karenakan pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya biasanya hanya menyelesaikan secara Kekeluargaan.⁵⁰

Dalam Proses Penyelesaiannya antara Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dengan pemanfaat dilakukan musyawarah dimana dengan kata lain hasil musyawarah biasanya *reconditioning* dan *rescheduling*. *Reconditioning* adalah angsuran diperkecil masa diperpanjang sedangkan *Rescheduling* adalah membuat data lama habis dan menjadwalkan pinjaman ulang dengan data baru. Dengan adanya kedua solusi tersebut hal itu tidak memberatkan pihak pemanfaat. Batas waktu (*Rescheduling*) yang di berikan oleh pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya kepada Pemanfaat adalah 3 (Tiga) Tahun jika pinjaman diatas Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta).

Akibat hukum yang dapat terjadi antara Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dengan pemanfaat yang tertuang di dalam Surat perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor 4 yang berbunyi "Jika terjadi keterlambatan angsuran oleh pihak kedua maka dikenakan denda sebesar 0,1 % perhari dari angsuran pokok + Bunga (Sesuai dengan sanksi yang telah disepakati dalam Musyawarah)".⁵¹

Pihak antara Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya juga menetapkan Bunga yang tertuang dalam Surat

⁵⁰ Wawancara dengan *Bapak Jaka Mulya*, Direktur BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 8 November 2021, Jam 16.00 WIB di Rumah Bapak Jaka Mulya.

⁵¹ Surat perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) BUMKam Jambai Jaya Kecamatan Kandis Tahun 2020 Nomor 4.

perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor 1 yang berbunyi “Pihak Pertama memberikan kredit / pinjaman dana BUMKam Jambai Jaya Kepada Pihak Kedua dengan Bunga sebesar 15% Pertahun”.⁵²

Sedangkan untuk jaminan pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor 5 “Jika Pihak kedua tidak sanggup melunasi kredit hingga batas waktu yang telah disepakati, atau tidak membayar angsuran pinjaman (Pokok+Bunga) selama tiga (3) Bulan berturut-turut, Maka jaminan akan menjadi pihak pertama untuk dilakukan penjualan agunan untuk melunasi sisa kredit kepada pihak pertama”.⁵³ Sekitar 15 pemanfaat telah dilakukan *Rescheduling* oleh Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya penyelesaian pinjaman dana agar lebih membantu pemanfaat yang ingin mengembalikan dana kepada pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP).⁵⁴

Dari hasil Penelitian yang sudah penulis lakukan di BUMKam Jambai Jaya Pada Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Bahwa pemanfaat yang meminjam di Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Makmur Sebanyak 18 pemanfaat sudah selesai mengembalikan pinjaman dana sesuai dengan tepat waktu, sesuai wawancara dengan salah satu pemanfaat yang sudah menyelesaikan pinjamannya yaitu Bapak Mesno T beliau mengatakan bahwa proses penyelesaian pembayaran dana pinjaman yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Sejauh ini berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ada.⁵⁵

⁵² Surat perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) BUMKam Jambai Jaya Kecamatan Kandis Tahun 2020 Nomor 1.

⁵³ Surat perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) BUMKam Jambai Jaya Kecamatan Kandis Tahun 2020 Nomor 5.

⁵⁴ Wawancara dengan *Bapak Jaka Mulya*, Direktur BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 8 November 2021, Jam 16.00 WIB di Rumah Bapak Jaka Mulya.

⁵⁵ Wawancara dengan *Bapak Mesno T*, Pemanfaat BUMKam Jambai Jaya Desa Jambai Makmur, Hari Senin, 10 Januari 2022, Jam 10.00 WIB di Rumah Bapak Mesno T.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh pihak Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Jambai Jaya melalui Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dalam prosedur prosedur yang ada dalam pemberian kredit kepada pemanfaatnya. Hal ini sudah diatur dan dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya yang terdapat di dalam petunjuk pelaksanaan dan juga di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan oleh program yang menaungi Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Bagian Pemberdayaan.
2. Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya sendiri dalam penyelesaian wanprestasi sejauh ini belum ada yang sampai ke tahap pengadilan, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya sendiri yaitu dengan cara musyawarah, yang dimana dalam melakukan musyawarah pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya mendatangi kediaman dari pihak debitur didampingi dengan ketua RT/RW setempat, tujuan dari musyawarah yang dilakukan antara pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dan pemanfaat ini yaitu untuk mengetahui penyebab atau kesulitan apa yang dialami oleh debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya dan dapat ditemukan solusi agar pihak debitur dapat mengangsur pinjaman kreditnya, setelah melakukan musyawarah antara pihak Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya dan pihak debitur melakukan Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) terhadap jadwal atau jangka waktu pembayaran utang maupun perubahan besaran angsuran.

B. Saran

1. Dalam kegiatan perkreditan ini sebaiknya Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya lebih meningkatkan kinerja pengelola dalam memberikan

pinjaman untuk lebih meminimalisir terjadinya kredit macet dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu tujuan dan fungsi dari Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya serta memberikan bimbingan dan arahan kepada pemanfaat untuk memanfaatkan dana pinjaman dengan baik dan benar agar dapat mencapai tujuan dari Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya sendiri, yaitu memberdayakan masyarakat menengah kebawah dalam pengembangan usaha.

2. Untuk tercapainya pemberian kredit yang baik, pengelola Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) Jambai Jaya seharusnya benar-benar melakukan prosedur-prosedur dalam pemberian kredit sebagaimana prosedur yang telah ada dalam berbagai teori. Serta tidak banyak memberikan kelonggaran kepada pemanfaat yang mengalami kredit macet agar tujuan dari Program Pemberdayaan Desa ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Budi Hartono, 2009, *Perlindungan Debitur KPM & KPR Menghadapi Penagihan Utang dan Lelang Jaminan oleh Kreditur*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Dasrol dan Hengki Firmanda, 2016, *Hukum Perbankan Cetakan I*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Gunawan Wijaya, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rochmat Soemitro, 1991, *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Refika Ofset, Bandung.

Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIII, Jakarta: Intermasa.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung.

Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin. 2012 *Hukum Kontrak*, Mandar Maju. Bandung.

V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.

B. Jurnal

Ngurah Pradita Putra. “*Penyelesaian Kasus Tentang Kredit Macet Pada PT. BPR Lestari*.” Kertha Semaya: Journal Hukum 2, no.4, (2018).

Retna Gumanti, “*Syarat sahnya perjanjian (di tinjau dari KUHPerdato)*”, JurnalPelangi Ilmu, Vol.05 No. 1 Tahun 2012.

Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi. 2006. *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR.

Yohanes Benny Apriyanto, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi*, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015

Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP).

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan penamaan Desa menjadi Kampung;

Peraturan Bupati Siak Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daya Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Kampung;